

KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM (UMUM) SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN SAGULUNG

Ardyanti Ahmad¹, Muhammad Solihin², dan Linayati Lestari³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

ardyantiahmad6@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

sm10rome@gmail.com

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

linayatilestari@yahoo.com

Abstrak

PPK dalam Pemilihan Umum dianggap unsur yang khusus karena termasuk sebagai ujung tombak penyelenggara dalam menyelesaikan masalah terkhusus data pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PPK terhadap penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung khususnya pada data pemilih yang bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kinerja PPK di Kecamatan Sagulung masih belum maksimal dikarenakan oleh adanya beberapa indikator yang belum termaksimalkan dalam segi pertama Kualitas yang kurang menyeluruh dalam hal sosialisasi PPK Sagulung terhadap Pantarlih yang melakukan pendataan Coklit di lapangan, KPPS yang melakukan rekapitulasi pleno dan masyarakat yang masih kurang paham akan adanya Pemilu Serentak 2019 yang berbasis E-KTP. Kedua Kuantitas Kinerja PPK Sagulung belum cukup baik karena penyelenggara pemilu di Kecamatan Sagulung terkhusus PPK terkait sosialisasi bimbingan teknik (BIMTEK) terhadap KPPS yang masih belum optimal. Pada tahapan Data yang berlangsung lama juga membuat petugas lapangan menjadi kewalahan untuk memverifikasi di lapangan. Pada tahap rekapitulasi, memakan waktu yang lama dikarenakan gedung kurang memadai untuk dilakukan pleno dengan banyak panel akibatnya jadwal selesai pleno mundur tidak sesuai jadwal. Kemudian ketiga dalam hal Efisiensi Pelaksanaan tugas PPK Sagulung telah melaksanakan semua tahapan-tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci: Kinerja, Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan.

Abstrack

PPK in the General Election is considered a special element because it is included as the spearhead of the organizers in solving problems, especially voter data. The purpose of this study was to determine the performance of the PPK on the holding of the 2019 general elections in Sagulung District, especially on problematic voter data. Based on the results of the research, it is known that the performance of PPK in Sagulung District is still not optimal due to the presence of several indicators that have not been maximized in the first aspect. The quality is not comprehensive in terms of socialization of PPK Sagulung to Pantarlih who conducts Coklit data collection in the field, KPPS who conducts plenary recapitulation and the community who still do not understand about the 2019 E-KTP-based Concurrent Election. Second, the performance quantities of PPK Sagulung are not good enough because election organizers in Sagulung District, especially PPK, are related to the socialization of technical guidance (BIMTEK) for KPPS which is still not optimal. At the data stage, which took a long time, it also made field officers overwhelmed to verify in the field. At the recapitulation stage, it takes a long time because the building is inadequate for a plenary session with many panels, as a result the schedule for completion of the plenary is not postponed according to

schedule. Then thirdly, in terms of Efficiency of Implementation of duties, PPK Sagulung has carried out all stages of the Election in accordance with existing laws and regulations.

Keywords: Performance, Elections, District Election Committee.

PENDAHULUAN

Salah satu cara mewujudkan demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan umum (Pemilu). Pemilu dipercaya sebagai mekanisme demokrasi yang bertujuan menyegarkan kembali komitmen dan moralitas serta mengganti kepemimpinan secara demokratis (Alpikri dan Lestari, 2017). Komisi pemilihan umum yang di singkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU juga bertugas untuk menanggulangi masalah-masalah yang terdapat disetiap pemilihan umum, termasuk pada saat pemilu 2019 lalu. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif.

Pemilu Serentak Tahun 2019 dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 berpandangan bahwa akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu. Selain itu, melalui Pemilu Serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan cerdas dan efisien. Dengan kata lain Pemilu Serentak akan membuat proses demokrasi pada pemilu menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan yang menyangkut lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan Pasangan Capres-Cawapres yang seringkali dilakukan berdasarkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara secara umum dan dalam jangka panjang (Triono, 2019).

Pada prakteknya, ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, antara lain pertama, penanganan logistik pemilu. Secara nasional, ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar-Daerah Pemilihan atau antar-TPS. Berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Kedua, terkait Penanganan Data Pemilih. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPT_{hp} 3) yang dilakukan KPU baru tuntas pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum Hari H Pencoblosan (Solihah, 2019). Ini berarti mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU, yaitu 19 Maret 2019. Beberapa pihak menyatakan

bahwa kendala utama keterlambatan adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan Data Pemilih secara komprehensif, sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak ter-update-nya Pemilih yang pindah domisili. Bawaslu juga menyatakan bahwa Sistem Informasi Data Pemilih milik KPU sering error sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data Ketiga terkait beban kerja KPPS. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat. Dan keempat adalah kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 (Ardipandanto, 2019).

Masalah-masalah yang terjadi di pusat berdampak sampai ke daerah-daerah di Indonesia termasuk Kota Batam. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah hanya pada data pemilih. di Kota Batam sendiri tingkat data pemilih bermasalah terbanyak ada di Kecamatan Sagulung. Adapun beberapa masalah terkait dengan data pemilih di Kecamatan Sagulung meliputi banyaknya pemilih yang sudah meninggal masih terdata, data ganda baik itu ganda nama pemilih yang sama dalam satu tps, antar tps, antar kelurahan, antar kecamatan atau bahkan antar provinsi, serta adanya masyarakat yang sudah lama tinggal tetapi tidak terdaftar di data pemilih.

Berikut data pemilih bermasalah yang selalu terjadi dalam setiap tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung:

Tabel 1
Data DPHP Kota Batam Periode Tahun 2018

Kecamatan	Data Pemilih Bermasalah			
	Ganda	Meninggal	Tidak Terdaftar	Jumlah
Sagulung	3426	390	3093	6909
Batam Kota	2733	245	2146	5124
Lubuk Baja	2043	60	189	2292
Sekupang	1593	145	798	2536
Batu Ampar	1390	101	345	1836
Bengkong	1499	115	121	1735
Batu Aji	1271	100	335	1706
Sei Beduk	845	112	290	1247
Nongsa	971	99	321	1391
Belakang Padang	297	87	109	493
Bulang	189	70	145	404
Galang	296	34	100	430

Sumber: KPU Kota Batam 2019

Tabel 1 diatas merupakan Data Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) yaitu data hasil olahan atau perbaikan dari Pihak Pantarlih di lapangan. Ternyata setelah Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dilapangan masih ditemukan berbagai masalah. Kecamatan Sagulung termasuk kecamatan dengan jumlah data pemilih DPHP yang bermasalah terbanyak se-Kota Batam yaitu berjumlah 6.909 dengan rincian Data Ganda berjumlah 3426, Data Meninggal yang masih terdata berjumlah 390, dan Data Pemilih yang tidak terdaftar berjumlah 3093. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana kinerja penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan Sagulung khususnya PPK sehingga pada saat perbaikan data masih saja menimbulkan data pemilih yang bermasalah bahkan terbanyak se-Kota Batam. Kemudian setelah adanya masalah di data DPHP awal selanjutnya pihak PPK Sagulung melakukan beberapa perbaikan lagi. Namun setelah dilakukan perbaikan dan keluar data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan, ternyata Kecamatan Sagulung masih sama yaitu memiliki banyak data yang bermasalah. Seperti adanya orang meninggal yang terdata, ganda, dan lain-lain. Data DPTHP tersebut dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 2
Data DPTHP Kota Batam Periode Tahun 2019

Kecamatan	Data Pemilih Bermasalah			
	Ganda	Meninggal	Tidak Terdaftar	Jumlah
Sagulung	1942	130	2340	4412
Batam Kota	1702	100	1908	3710
Lubuk Baja	1238	80	234	1552
Sekupang	1048	98	150	1296
Batu Ampar	942	112	210	1264
Bengkong	936	108	98	1142
Batu Aji	866	88	200	1154
Sei Beduk	509	90	130	729
Nongsa	469	99	111	679
Belakang Padang	184	93	45	322
Bulang	135	23	90	248
Galang	130	10	50	190

Sumber: KPU Kota Batam 2019

Selanjutnya Tabel 2 diatas merupakan data pada tahapan DPTHP akhir masih ditemukan juga data pemilih yang bermasalah di Kecamatan Sagulung yang berjumlah 4.412 dengan rincian Data Pemilih Ganda berjumlah 1942, Data Meninggal yang masih terdata berjumlah 130 dan Pemilih yang tidak terdaftar berjumlah 2.340. selain itu Kecamatan

Sagulung juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak di banding dengan kecamatan lain di Kota Batam, sehingga pada Pemilu serentak tahun 2019 kecamatan Sagulung memiliki tempat pemungutan suara (TPS) terbanyak yaitu 582 TPS. Jumlah TPS Kecamatan Sagulung dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 3
Jumlah TPS Se-Kota Batam Periode 2019

No.	Kecamatan	Jumlah TPS
1.	Sagulung	582
2.	Batam Kota	436
3.	Sekupang	347
4.	Bengkong	265
5.	Batu Aji	281
6.	Lubuk Baja	232
7.	Sei Beduk	229
8.	Batu Ampar	214
9.	Nongsa	186
10.	Belakang Padang	70
11.	Galang	52
12.	Bulang	33
	Jumlah Keseluruhan	2927

Sumber: KPU Kota Batam 2019

Dengan jumlah penduduk dan TPS yang sangat banyak demikian membuat resiko data bermasalah di lapangan juga semakin meningkat termasuk mengenai masalah data pemilih (Chandra, 2019). Dengan beberapa masalah tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana kinerja PPK Sagulung dalam Pemilu Serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung.

METODELOGI

Jenis Penelitian yang telah digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Lestari dkk, 2015). Pemakaian metode pada penelitian ini sudah disesuaikan dengan tujuan pokok penulisan yaitu mengetahui kinerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung.

Pada penulisan penelitian ini peneliti telah menggunakan sumber data primer dan data sekunder, adapun tempat penelitian ini adalah di Kecamatan Sagulung, serta teknik pengumpulan

data yang telah digunakan pada penulisan penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori utama dari Wirawan (2009: 99) dalam bukunya Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia dijelaskan, bahwa kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu, yaitu: *Pertama*, Kualitas; *Kedua*, Kuantitas; dan *Ketiga*, Efisiensi Pelaksanaan Tugas.

Berangkat dari pemahaman teoritis, dengan pendekatan konsep Wirawan, maka penulis telah mengadopsi variabel yang telah dikembangkan oleh ahli tersebut dan disesuaikan dengan jenis, isi dan lingkungan kinerja yang dikaji dan telah menghasilkan pembahasan dan kesimpulan, berikut adalah hasil dari pembahasan dari penulisan penelitian ini:

Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan salah satu alat penunjang keberhasilan kinerja PPK Sagulung di dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019, karena jika para penyelenggara pemilu termasuk PPK tidak memiliki kualitas yang baik maka semua kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dalam melihat kualitas peneliti melihat dari tahapan pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sagulung yakni tahap sosialisasi, tahap pengelolaan data, dan tahap Rekapitulasi.

Pada tahapan sosialisasi Aldi selaku Panwaslu Kecamatan Sagulung menyatakan bahwa dari penyelenggara pada tingkat kecamatan di Sagulung kurang mensosialisasikan Pemilu, khususnya pemilu berbasis KTP sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 pasal 210 ayat 3, yang menurut beliau membuat data banyak yang bermasalah dikarenakan ketidaktahuan masyarakat.

“Disini kami selaku Panwaslu mendapatkan bahwasanya pihak penyelenggara pemilu khususnya PPK Sagulung kurang dalam mensosialisasikan pemilu yang berbasis E-KTP tersebut, akibatnya banyak ditemukannya data yang bermasalah”¹

¹ Aldi, Panwaslu Kecamatan Sagulung. Wawancara tanggal 30 Juli 2020

Kurangnya sosialisasi juga dirasakan oleh beberapa penyelenggara tingkat lapangan, seperti Supartono, Pantarlih Kelurahan Sagulung Kota yang menyatakan masih kebingungan mengisi formulir coklit dan prosedur lainnya dikarenakan sosialisasi pada saat Bimbingan Teknis kurang maksimal.

“PPK dan PPS ketika itu kurang jelas dalam mensosialisasikan bimtek . Kebetulan saya kan RT juga nih, banyak juga loh beberapa RT lain yang kebingungan. Kami bingung nanya sama PPS nya gimana cara isi form coklit dan lain-lain”²

Pernyataan diatas juga didukung oleh Gong Martua Raja, Anggota PPK Kecamatan Sagulung yang menyatakan bahwa memang bimbingan teknis cuma dilakukan 1 kali.

“Bimtek memang kami selaku PPK juga menyadari bahwasanya Bimtek yang dilakukan itu hanya sekali saja. Kemudian pada saat kami melakukan Bimtek ada beberapa Pantarlih yang tidak hadir dan hanya mewakilkan orang lain untuk menghadiri Bimtek yang kami laksanakan, akibatnya tidak semua Pantarlih yang paham”³

Pada Data pemilih menurut Eko Ketua PPS Kelurahan Tembesi terjadi permasalahan data dilapangan dikarenakan sumberdaya di lapangan memiliki pekerjaan utama yang menyebabkan mereka mengutamakan pekerjaan utama yang menyebabkan banyak petugas lapangan yang tidak melaksanakan prosedur coklit dengan benar.

Masalahnya adalah pantarlih yang kami rekrut berasal dari RT yang notabenenya memiliki pekerjaan pokok, dimana mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas sebagai pantarlih. Kemudian banyak diantara pantarlih yang melakukan coklit dengan tidak turun ke lapangan langsung hanya melihat data penduduk yang mereka miliki. Padahal tidak menutup kemungkinan data penduduk yang sudah berubah karena pindah alamat. Disitulah timbul data awal yang bermasalah ...”⁴

Pada tahapan rekapitulasi, Yoga Prasetyo selaku saksi partai PDIP menguraikan Kecamatan Sagulung mengalami berbagai masalah seperti lambatnya rekapitulasi di wilayah sagulung sebagai kecamatan yang terakhir selesai pleno di Kota Batam. Menurut Yoga Prasetyo ditemukan kesalahan perhitungan dari KPPS dalam Pleno yang salah akibat dari kurang pahamiannya KPPS.

² Supartono, *Pantarlih Kelurahan Sagulung Kota*. Wawancara tanggal 30 Juli 2020

³ Gong Martua Raja, *Anggota PPK Kecamatan Sagulung*. Wawancara tanggal 30 Juli 2020

⁴ Eko, *Ketua PPS Kelurahan Tembesi*. Wawancara tanggal 30 Juli 2020

sagulung ini mbak banyak sekali yang bermasalah. Ntah itu dari data pemilih, rekapitulasinya lambat dan lain-lain. untuk rekapitulasi saya agak kurang pas di hati saya soalnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat rekapitulasi atau pleno. Seperti kejadian di TPS 17 Kelurahan Tembesi, disitu terjadi tumpang tindih suara karena perhitungan dari KPPS nya banyak yang salah. ntah diakibatkan oleh KPPS nya yang kurang paham dalam pengisian kertas plano, atau mungkin ada niat tersendiri atau ada oknum-oknum tertentu yang bermain untuk kepentingan tertentu... ”⁵

Kinerja PPK di Kecamatan Sagulung dalam hal Kualitas masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan oleh karena anggota PPK, PPS, dan Pantarlih selain mengemban tugas tersebut juga memiliki pekerjaan utama yang mempengaruhi kinerja di lapangan. Salah satunya kesempatan Bimtek yang hanya satu kali. Permintaan Komsioner KPU kota untuk verifikasi data lapangan terkadang tidak dilaksanakan dengan maksimal karena waktu pekerjaan utama.

Kuantitas Kerja

Kuantitas Kerja PPK Sagulung dilihat dari hasil kerja dalam penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tentu berupa juga pengetahuan, keterampilan, sikap mental, dan sosial.

Pada tahapan sosialisasi Usman Abdullah, Selaku Ketua KPPS TPS 39 Kelurahan Sei Lekop mengeluhkan bimbingan teknis yang cuma 1 hari dengan jumlah peserta yang banyak. Ini berbeda dengan bimbingan teknis pemilu sebelumnya yang dilakunan disetiap RT dan RW. Akibatnya mereka masih bingung mengisi formulir yang begitu banyak jenisnya.

“bimteknya Cuma sau hari trus sangat beda dengan bimtek dulu, kalo dulu bimteknya dilakukan per RW atau per RT. Nah yang untuk 2019 kami bimtek gabung dalam satu kelurahan. Dan gitu waktunya cuma satu hari. Tentu kami merasa kebingungan pada saat hari H (hari pelaksanaan Pemilu) ”⁶

Wilhelmuna Tuto, Selaku anggota KPPS TPS 73 mengeluhkan pemilu 2019 yang begitu banyak menyita waktu dan ternyata akibar kurang pemahannya anggota ternyata apa yang kami kerjakan masih banyak yang tidak benar.

⁵ Yoga Prasetyo, *Saksi Partai PDIP*. Wawancara tanggal 02 Agustus 2020

⁶ Usman Abdullah, *Ketua KPPS TPS 39 Kelurahan Sei Lekop*. Wawancara tanggal 01 Agustus 2020

“selesai perhitungan suara pukul 19:00 wib, habis itu kami lanjutkan dengan merekap hasil perhitungan suara. Benar-benar susah sampai memakan waktu 4 jam. Parahnya lagi kami kira sudah selesai ternyata pas PPL dan PPS datang untuk mengecek, semua rekapan kami banyak yang salah dan harus dilakukan rekapan ulang di depan saksi dan panwas”

Pada Tahap Data, menurut Iksan, Ketua PPS Kelurahan Sei Pelungut mengeluhkan tahapan data yang memakan waktu lama, dan harus terus melakukan pemuktahiran data yang menguras tenaga.

“Hari ini kami mutakhirkan data misalnya, maka tidak lama berselang terjadi perubahan data pemilih secara otomatis karna nama tersebut sudah terdaftar di provinsi lain atau dikenal juga dengan nama ganda. Karena itulah tahapan kami pada saat mengupload data sangat memakan waktu yang lama”⁷

Pada Tahap Rekapitulasi, Rekapitulasi di Kecamatan Sagulung mengalami keterlambatan hingga memakan waktu 21 hari dari waktu yang ditentukan yaitu 14 hari. Menurut Koko Jerico, salah satu Saksi Partai GOLKAR Kecamatan Sagulung berpendapat harusnya Pleno Kecamatan harusnya langsung system panel yang melibatkan 6 kelurahan sekaligus.

“pada saat rekapitulasi yang saya lihat disitu penyelenggara pemilu di Kecamatan Sagulung terkhusus PPK kurang kreatif. Karena seharusnya panel-panel untuk pleno pada waktu itu langsung dibuka ke enam kelurahan. Kenapa harus 3 kelurahan dulu dan menunggu kelurahan lain siap baru pasang panel kelurahan baru. Itu kan memakan waktu lama”⁸

Indahana, Selaku anggota PPK Kecamatan Sagulung menjelaskan bahwa tempat pleno memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan 6 panel sekaligus dikarenakan tempat pleno yang sempit.

“sebenarnya begini kalo soal panel itu adalah arahan KPU, dikarenakan ruko tempat pleno tersebut tidak bisa memuat enam kelurahan. Dikhawatirkan jika kami membuka panel di luar ruko akan menimbulkan suasana yang kisruh”

Apa yang telah diuraikan diatas menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu di Kecamatan Sagulung terkhusus PPK terkait sosialisasi bimbingan teknik (BIMTEK) terhadap KPPS yang masih belum optimal. Pada tahapan Data yang berlangsung lama juga membuat

⁷ Iksan, Ketua PPS Kelurahan Sei Pelungut. Wawancara tanggal 02 Agustus 2020

⁸ Koko Jerico, Kader Partai GOLKAR Kecamatan Sagulung. Wawancara tanggal 01 Agustus 2020

petugas lapangan menjadi kewalahan untuk memverifikasi di lapangan. Pada tahap rekapitulasi, memakan waktu yang lama dikarenakan gedung kurang memadai untuk dilakukan pleno dengan banyak panel akibatnya jadwal selesai pleno mundur tidak sesuai jadwal.

Efisiensi Pelaksanaan Tugas

Efisiensi Pelaksanaan Tugas adalah pelaksanaan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya secara disiplin dan taat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada tahap sosialisasi, menurut Mulyadi selaku Komisioner KPU Batam tahun 2019 permasalahan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tata cara/tahapan pemilu kepada masyarakat

“saya selaku Komisioner KPU korwil Sagulung melihat kondisi pemilu 2019 kemarin di Kecamatan Sagulung sebenarnya kenapa terjadi permasalahan itu disebabkan oleh kurangnya penyelenggara pemilu dalam mensosialisasikan tata cara atau tahapan pemilu kepada masyarakat. Padahal tugas dan tanggung jawab PPK salah satunya ialah mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan itu tertuang jelas dalam PKPU no 3 Tahun 2018”⁹

Menurut tokoh masyarakat sagulung yakni Ilyas Langoday dan Asmal memberikan masukan agar kedepannya PPK Sagulung lebih memaksimalkan kinerjanya pada sosialisasi kepada masyarakat.

Pada Tahapan data, menurut Reza Khadafi, S.STP., MPA. selaku Camat Sagulung kami telah membantu PPK Sagulung dalam hal pemutakhiran data pemilih dengan membantu sinkronisasi dengan data Aplikasi Dinas Kependudukan yang datanya lebih baru. Cara ini cukup efektif membantu PPK Sagulung.

“Dan kami dari pihak Kecamatan Sagulung juga membantu dalam sinkronisasi dalam hal memberikan aplikasi disduk yang datanya terupdate di bandingkan dengan data dari KPU yang merupakan data 5 tahun sebelumnya. Dengan cara tersebut cukup efektif dalam membantu pihak PPK Sagulung untuk mencari data-data pemilih”¹⁰

Selanjutnya menurut Aldi selaku PPS Kelurahan Sungai Langkai menilai kinerja PPK Kecamatan Sagulung dalam pemutakhiran data telah maksimal, namun saran untuk perekrutan petugas lapangan kedepan diharapkan memilih dari anak muda yang lebih paham

⁹ Mulyadi, *Komisioner KPU Kota Batam*. Wawancara tanggal 30 Agustus 2020

¹⁰ Reza Khadafi, S.STP., MPA, *Camat Sagulung*. Wawancara tanggal 30 Agustus 2020

teknologi informasi serta tidak memiliki pekerjaan, hal ini agar bisa lebih focus dalam pelaksanaan pemilu.

“Kalo Soal data PPK Sagulung Sudah Melakukannya Semaksimal Mungkin seperti yang kita tahu PPK Sagulung melakukan kerja sama yang baik oleh instansi terkait agar mempermudah dalam mensinkronisasi data dan itu sudah tanggung jawab PPK, sebagai saran untuk pemilu yang akan mendatang, pihak PPK Sagulung dalam hal perekrutan Petugas Pantarlih maupun KPPS agar memilih dari kalangan yang muda dan yang lebih paham mengenai komputer serta sekalian yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang lain agar bisa focus terhadap penyelenggaraan pemilu”

Efisiensi Pelaksanaan tugas PPK Sagulung telah melaksanakan semua tahapan-tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas, penulis menyampaikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kinerja PPK di Kecamatan Sagulung dalam hal Kualitas masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan oleh karena anggota PPK, PPS, dan Pantarlih selain mengemban tugas tersebut juga memiliki pekerjaan utama yang mempengaruhi kinerja di lapangan. Salah satunya kesempatan Bimtek yang hanya satu kali. Permintaan Komsioner KPU kota untuk verifikasi data lapangan terkadang tidak dilaksanakan dengan maksimal karena waktu pekerjaan utama.
2. Kuantitas Kinerja PPK Sagulung belum cukup baik karena penyelenggara pemilu di Kecamatan Sagulung terkhusus PPK terkait sosialisasi bimbingan teknik (BIMTEK) terhadap KPPS yang masih belum optimal. Pada tahapan Data yang berlangsung lama juga membuat petugas lapangan menjadi kewalahan untuk memverifikasi di lapangan. Pada tahap rekapitulasi, memakan waktu yang lama dikarenakan gedung kurang memadai untuk dilakukan pleno dengan banyak panel akibatnya jadwal selesai pleno mundur tidak sesuai jadwal.
3. Efisiensi Pelaksanaan Tugas Kinerja PPK Sagulung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sudah berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu PKPU Nomor 3 tahun 2018. Dan terkait koordinasi dengan instansi lain sudah terjalin dengan harmonis, koordinasi tersebut bertujuan untuk membangun sinergi satu

sama lain, disamping menghindari kesalahpahaman dan kekisruhan antara semua pihak terkait dengan kinerja PPK Sagulung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpikri, A dan Linayati Lestari (2017). Marketing Politik Pemenangan Jokowi-JK Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014. *Jurnal Trias Politika*. 1 (1).
- Ardipandanto, Aryojati. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 11(11) : 25-30.
- Chandra, Romi. (2019). Pemilu di Batam Banyak Masalah. Di unduh pada <https://m.batamtoday.com/berita128563-Pemilu-di-Batam-Banyak-masalah> tanggal 4 Oktober 2019 pukul 18:40 WIB.
- Lestari, L., Lumbantobing, I.T., dan Johar, S.S. 2015. *Political Behavior of Beginner Voters in Mayor Election Batam 2015 at Sagulung Kota*. *Journal of Techno Social*. 10(2): 11-16.
- Solihah, Ratnia. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 3(1) : 73-88.
- Triono. (2019). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Wacana Politik*. 2 (2) : 156-164.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Salemba Empat.